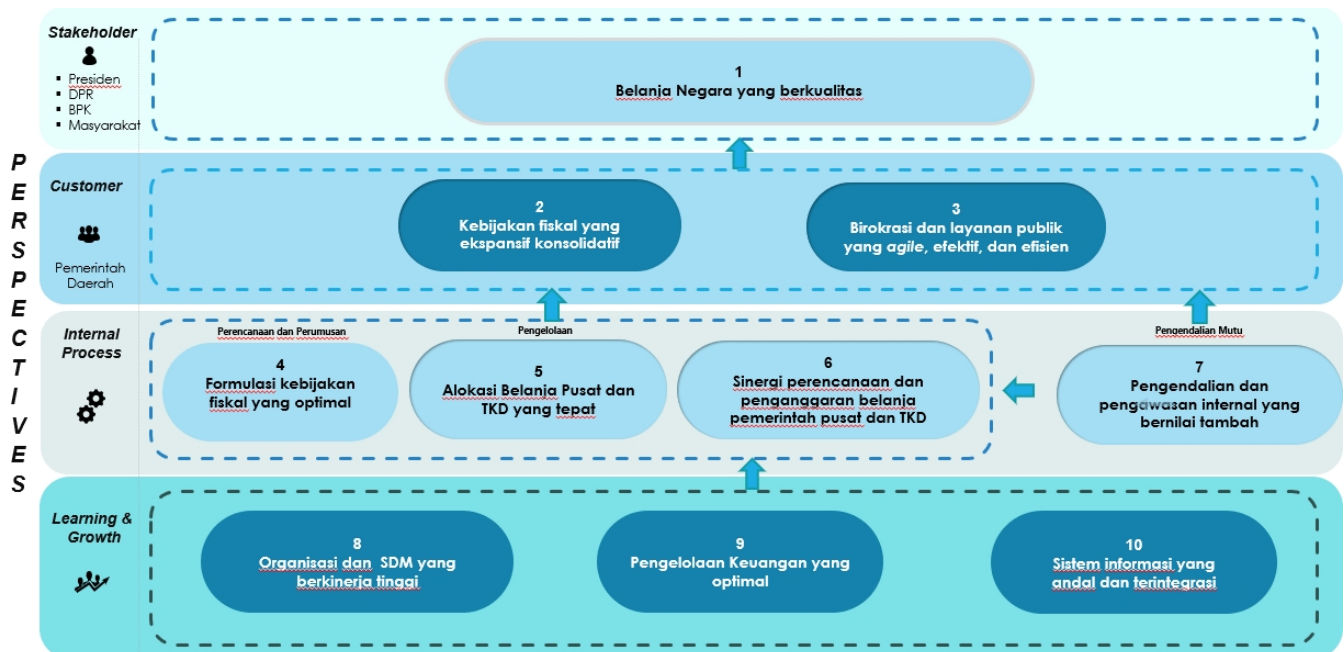




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/MK/2023
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas	1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	86,5
		1b-N Indeks ketimpangan antarwilayah	0,235
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi	86
		2b-CP Tingkat implementasi KEM PPKF regional	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-N Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat	5a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	31,94%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
		6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
		7b-CP Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
		7c-CP Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%
8	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%
		8b-CP Indeks integritas organisasi	97,05
		8b1-CP Indeks integritas	91,16
		8b2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		8b3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8c-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
		8d-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		8d1-CP Tingkat implementasi learning organization	90%
		8d2-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		8e-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		8f-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
9	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100
		9a1-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		9a2-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9a3-N Indeks efisiensi belanja birokrasi	85
		9b-CP Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3
10	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		10a1-CP Tingkat downtime sistem TIK	0,10%
		10a2-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		10a3-CP Tingkat penyelesaian data analytics	85%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1.	Program Kebijakan Fiskal	Rp	2.805.771.000
	Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	2.805.771.000
a.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	2.805.771.000
2.	Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp	13.519.164.000
	Output Program: Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Rp	8.870.396.000
a.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	4.050.569.000
b.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	2.962.234.000
c.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	Rp	1.484.408.000
d.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp	373.185.000
	Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda	Rp	4.648.768.000
a.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	3.483.791.000
b.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	729.762.000
c.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp	435.215.000



3. Program Dukungan Manajemen	Rp	55.024.791.000
Output Program: Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Rp	48.685.431.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)	Rp	41.186.024.000
b. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (DJPK)	Rp	755.583.000
c. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)	Rp	6.743.824.000
Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan	Rp	6.045.307.000
a. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (DJPK)	Rp	6.045.307.000
Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	Rp	294.053.000
a. Legislasi dan Litigasi	Rp	214.053.000
b. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)	Rp	80.000.000

Jakarta, 27 Januari 2023

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas							
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah				30	30	86,5	86,5
1b-N	Indeks ketimpangan antarwilayah						0,235	0,235
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi						86	86
2b-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF regional		50%	50%		50%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas				60	60	100	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat							
5a-N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						31,94 %	31,94%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD		30%	30%	60%	60%	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD						100%	100%
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7c-CP	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75%	75%
8	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-CP	Indeks integritas organisasi						97,05	97,05
8b1-CP	Indeks integritas						91,16	91,16
8b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
8b3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK						100%	100%
8c-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
8d-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	95%	95%
8d1-CP	Tingkat implementasi learning organization						90%	90%
8d2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	100%	100%
8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100		100	100	100
8f-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
9	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015		68	68		68	90,4	90,4
9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi		85	85		85	85	85
9b-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3		3	3	3



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10a1-CP	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
10a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
10a3-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	23%	46%	46%	69%	69%	85%	85%

Jakarta, 27 Januari 2023

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dr. Luky Alfirman, S.T.,M.A.	NAMA	Sri Mulyani Indrawati	
NIP	197003271995031002	NIP	-	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	-	
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	86,5	Penerima Layanan
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,235	Penerima Layanan
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan
		Tingkat implementasi KEM PPKF regional	100%	Penerima Layanan
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan



4.	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	Proses Bisnis
5.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	31,94%	Proses Bisnis
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
7.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%	Proses Bisnis
8.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks integritas organisasi	97,05	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu	95%	Penguatan Internal atau Anggaran



		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA

<ul style="list-style-type: none">- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
--	--

27 Januari 2023

Pegawai



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002

Pejabat



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

-



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	536 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah				30	30	86,5	86,5
2	Indeks ketimpangan antarwilayah						0,235	0,235
3	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi						86	86
4	Tingkat implementasi KEM PPKF regional		50%	50%		50%	100%	100%
5	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
6	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas				60	60	100	100
7	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						31,94%	31,94%
8	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD		30%	30%	60%	60%	100%	100%



9	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD						100%	100%
10	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	90%	90%
11	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat efektivitas pengawasan BUN						75%	75%
13	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Indeks integritas organisasi						97,05	97,05
15	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
16	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20%	20%		20%	95%	95%
17	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100		100	100	100
18	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
19	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3		3	3	3
21	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan



yang berlaku.

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002

Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

-

